



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES
NOMOR 04 TAHUN 2024

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS 47
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES
PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BREBES NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BREBES
PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS 48
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES
PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
TENTANG PERUBAHAN BADAN HUKUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK
PREKEDITAN RAKYAT BREBES MENJADI PERSEROAN TERBATAS DAERAH
BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK BREBES DAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES TENTANG PENYERTAAN MODAL
DAERAH PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH PERCETAKAN PUSPA
GRAFIKA,
PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS 49
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES
PEMBAHAS TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BREBES
TAHUN 2024-2044, DAN
PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS 50
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES
PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA LOKAL DAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES

Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah
Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Brebes, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes

tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Brebes menjadi Perseroan Terbatas Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Brebes dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Percetakan Puspa Grafika, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Brebes Tahun 2024-2044, dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Perlindungan Tenaga Kerja Lokal dan Pekerja Migran Indonesia secara resmi telah disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes pada tanggal 20 Maret 2024;

- b. bahwa berdasarkan Pasal 74 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Nomor 01 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes, maka perlu membentuk Panitia Khusus untuk membahas lebih lanjut rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. berdasarkan Rapat Paripurna menyampaikan 5 (lima) Raperda Kabupaten Brebes pada tanggal 25 Januari 2024 maka perlu membentuk Panitia Khusus 47 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes pembahas Rancangan Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes, Panitia Khusus 48 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Brebes menjadi Perseroan Terbatas Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Brebes dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Percetakan Puspa Grafika, Panitia Khusus 49 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang

Tata Ruang Wilayah Kabupaten Brebes Tahun 2024-2044, dan Panitia Khusus 50 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Perlindungan Tenaga Kerja Lokal dan Pekerja Migran Indonesia;

- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55688) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Brebes Nomor 01 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2019 Nomor 69).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

K E S A T U : Membentuk Panitia Khusus 47 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Pembahas Rancangan Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes, Panitia Khusus 48 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Brebes menjadi Perseroan Terbatas Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Brebes dan Rancang Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Percetakan Puspa Grafika, Panitia Khusus 49 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Brebes Tahun 2024-2044, dan Panitia Khusus 50 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Perlindungan Tenaga Kerja Lokal dan Pekerja Migran Indonesia, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

K E D U A : Masa kerja panitia khusus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ditetapkannya rancangan

peraturan daerah yang dibahas oleh panitia khusus dimaksud.

K E T I G A : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes;

K E E M P A T : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 20 Maret 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES

Ketua,



Tembusan :

1. Pj. Gubernur Jawa Tengah ;
2. Pj.Bupati Brebes ;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Brebes ;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes ;
5. Himpunan Keputusan DPRD Kabupaten Brebes.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BREBES

NOMOR : 04.a TAHUN 2024

TANGGAL : 20 MARET 2024

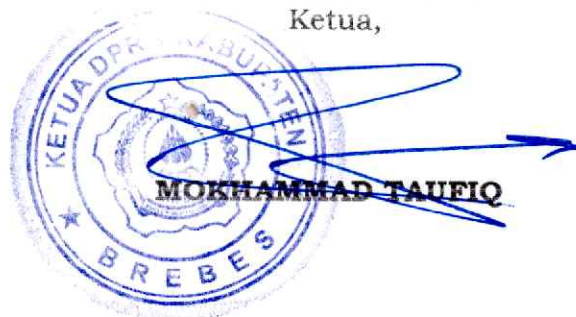
KOORDINATOR PANSUS 47, 48, 49, DAN 50

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES

NO	N A M A	ASAL FRAKSI	JABATAN DALAM PANSUS
1.	MOKHAMMAD TAUFIQ, S.Sn.	PDI P.	Koordinator
2.	H. ZUBAD FATHILATAH, S.E.,M.M.	PKB	Koordinator
3.	H. TEGUH WAHID TURMUDI, S.H.	P. GOLKAR	Koordinator
4.	WURJA, S.E.	P. GERINDRA	Koordinator

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES

Ketua,



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES
NOMOR : 04.b TAHUN 2024
TANGGAL : 20 MARET 2024

SUSUNAN KEANGOTAAN PANITIA KHUSUS 47
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES
PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES TENTANG
RANCANGAN PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BREBES NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN
DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BREBES DAN
PEMBAHAS RENCANA KERJA DPRD KABUPATEN BREBES TAHUN 2025

NO	N A M A	ASAL FRAKSI	JABATAN DALAM PANSUS
1.	RIZKI UBAIDILLAH, S.Psi	PDI P.	Ketua merangkap Anggota
2.	MURNAENI, S.E	P. GERINDRA	Wakil Ketua merangkap Anggota
3.	CAHRUDIN	PDI P.	A n g g o t a
4.	DIDI TUSWANDI, A.Md.	PDI P.	A n g g o t a
5.	NASIRUL UMAM, S.T.,M.H.	PKB	A n g g o t a
6.	Hj. SITI FARLIJAH ZA, S.Ag.	PKB	A n g g o t a
7.	PAMOR WICAKSONO, S.H.	P. GOLKAR	A n g g o t a
8.	ZAKI SAFRUDIN P	PAN - DEMOKRAT	A n g g o t a
9.	H.MUHAEMIN	P. GERINDRA	A n g g o t a
10.	ARIEF ROYANI,S.E.,S.Pd	PKS	A n g g o t a
11.	KH. NURIDIN,M.Pd.I	PPP	A n g g o t a

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES

Ketua.



MOKHAMMAD TAUFIQ

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES
NOMOR : 04.c TAHUN 2024
TANGGAL : 20 MARET 2024

SUSUNAN KEANGOTAAN PANITIA KHUSUS 48
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES
PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
TENTANG PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN UMUM
DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BREBES MENJADI PERSEROAN
TERBATAS DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK BREBES DAN
RANCANGPERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PERCETAKAN PUSPA GRAFIKA,

NO	N A M A	ASAL FRAKSI	JABATAN DALAM PANSUS
1.	MUHAIMIN SADIRUN, S.H.,M.H	GERINDRA	Ketua merangkap Anggota
2.	H. AHMAD ZAMRONI, S.Ag.	PKB	Wakil Ketua merangkap Anggota
3.	Dr. H. ILLIA AMIN, M.M.Pd.	PDI P.	Anggota
4.	INDAH ELI PURWATI	PDI P.	Anggota
5.	H. IMAM ROYANI,S.Pd.I	PKB	Anggota
6.	MASHADI	PDI P	Anggota
7.	ZUBAIDAH , S.Ag.,M.H.	P. GOLKAR	Anggota
8.	SUDONO, S.H.	P. GOLKAR	Anggota
9.	H. WASUDI,S.Pd.I,M.Si	PKS	Anggota
10.	JONI WALUYO, S.H.	PAN – DEMOKRAT	Anggota
11.	MOH. NIZWAR ALFISYAHRI	PAN – DEMOKRAT	Anggota
12.	H. IMAM SAIRI, S.Pd.I	PPP	Anggota

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES
Ketua,


MOKHAMMAD TAUFIQ

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES
NOMOR : 04.d TAHUN 2024
TANGGAL : 20 MARET 2024

**SUSUNAN KEANGOTAAN PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS 49
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES
PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
TENTANG TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BREBES
TAHUN 2024-2044**

NO	N A M A	ASAL FRAKSI	JABATAN DALAM PANSUS
1.	HERI FITRIANSYAH,S.T,M.Si	PAN – DEMOKRAT	Ketua merangkap Anggota
2.	MOH.IQBAL TANJUNG,S.Sos,M.A	PKB	Wakil Ketua merangkap Anggota
3.	NASIKUN HMS	PDI P.	A n g g o t a
4.	WANURI, S.Pd.I	PDI P.	A n g g o t a
5.	SUKIRSO	PDI P	A n g g o t a
6.	WAIDIN, S.T	PKB	A n g g o t a
7.	ACHMAD MAFRUKHI, S.E.	P.GOLKAR	A n g g o t a
8.	KHAJIRIN, S.Pd.I	P. GOLKAR	A n g g o t a
9.	TOBIDIN, S.H.,M.H	PAN – DEMOKRAT	A n g g o t a
10.	H.ABDULLAH SYAFA'AT	PKS	A n g g o t a
11.	H. MOH. ZAMRONI, S.E.	PPP	A n g g o t a
12	H. NUR ENDRO	P. GERINDRA	A n g g o t a

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES
Ketua,


MOKHAMMAD TAUFIQ

LAMPIRAN V : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES
NOMOR : 04.e TAHUN 2024
TANGGAL : 20 MARET 2024

**SUSUNAN KEANGOTAAN PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS 50
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES
PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
TENTANG PERLINDUNGAN TENAGA KERJA LOKAL DAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA**

NO	N A M A	ASAL FRAKSI	JABATAN DALAM PANSUS
1.	MUSTHOLLAH,S.H,M.H.	PKB	Ketua merangkap Anggota
2.	HJ.KHARIROH, S.Pd.I	PDI P.	Wakil Ketua merangkap Anggota
3.	WARASKAH YANTI, S.H.,M.H	PDI P.	A n g g o t a
4.	Hj. TRI MURDININGSIH, S.Psi., M.Psi.	PDI P.	A n g g o t a
5.	H.HARYANTO	PKB	A n g g o t a
6.	H.MUSYAFFA	PKB	A n g g o t a
7.	BENNY PURNOMO, S.E.	P. GOLKAR	A n g g o t a
8.	H. AKHMADA ROWI	P. GERINDRA	A n g g o t a
9.	Hj.OPY ROPIYAH,S.H.,M.Kn	PAN – DEMOKRAT	A n g g o t a
10.	KHOLIDIN	PKS	A n g g o t a
11.	H. ACHMAD KHUMAIDI	PPP	A n g g o t a

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES
Ketua,


MOKHAMMAD TAUFIQ